

Booklet Seri Keenam

JALAN PENGABDIAN BARU

PENGUATAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Booklet Seri Keenam
Jalan Pengabdian Baru:
Penguatan Layanan kepada Masyarakat

Booklet Seri Keenam
Jalan Pengabdian Baru:
Penguatan Layanan kepada
Masyarakat

Editor:

Emma Soraya
Andita A. Pratama
Aji Sukmono B. Nurjaman
Ani Adiwinata

Tata Letak Isi:

Sarjoko S.

Dipublikasikan oleh:
Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada

Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman, Caturtunggal,
Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
fkt.ugm.ac.id

Foto Cover:

CIFOR/Muhammad Sidik

Tidak untuk diperjual belikan

Booklet ini merupakan seri keenam (dari enam seri) hasil penelitian “Peningkatan Efektivitas Model Pranata dan Tata Kelola dalam Mencapai Pengelolaan Hutan Lestari: Studi Kasus di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta” kerjasama antara *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dengan Fakultas Kehutanan UGM dan Balai KPH Yogyakarta di bawa proyek penelitian Kanoppi 2: Membangun dan mempromosikan wana tani berbasis pasar dan integrasi pengelolaan lanskap untuk petani hutan di Indonesia

2021

Kata Pengantar

CIFOR (*Center for International Forestry Research*) melalui kegiatan penelitian aksi partisipatif Kanoppi, sangat bangga dengan diterbitkannya seri booklet yang didukung dana ACIAR (*Australian Center for International Agricultural Research*). Booklet ini disusun sebagai bagian dari studi “Peningkatan efektivitas model tata kelola dalam upaya mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan: Studi kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta.” Studi ini merupakan salah satu kegiatan penelitian dalam rangka memformulasikan rekomendasi un-tuk penyusunan kelembagaan yang tangguh di tingkat tapak. CIFOR berterima kasih kepada para mitra yang sudah terlibat dalam penelitian ini, terutama Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I. Yogyakarta dan KPH Yogyakarta.

Koordinator Penelitian Kebijakan Kanoppi

Ani Adiwinata Nawir, Ph.D

Pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia belum menggembirakan, dicerminkan oleh deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung. Kebijakan pembentukan KPH ditujukan untuk merespons kebutuhan akan pengelola hutan di tingkat tapak yang profesional dan mandiri yang dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Balai KPH Yogyakarta memiliki sejarah panjang dan saat ini dipandang sebagai salah satu rujukan utama bagi KPH-KPH lain di Indonesia. Walaupun demikian, kami secara kontinu mengembangkan berbagai inovasi, termasuk dengan bersinergi dengan berbagai mitra. Melalui kerjasama dengan *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dan Fakultas Kehutanan UGM ini, kami berharap pengelolaan hutan oleh Balai KPH Yogyakarta semakin profesional. Dengan seri booklet ini, kami berharap diseminasi model-model kelola, pengalaman dan tantangan di Balai KPH Yogyakarta, dapat menjadi pembelajaran bagi KPH lain di Indonesia.

Kepala Balai KPH Yogyakarta

Aji Sukmono B. Nurjaman, S.Hut, M.P

Sejalan dengan visi universitas sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif dan mengabdikan kepada kepentingan bangsa, Fakultas Kehutanan UGM secara kontinu berupaya menjadi elemen penting untuk mewujudkan pembangunan kehutanan nasional berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mencapai hal tersebut, Fakultas Kehutanan UGM terus menjalin kerjasama dan sinergi dengan berbagai mitra baik nasional maupun internasional. *Center for International Forestry Research* (CIFOR) merupakan salah satu mitra penting kami. Melalui kerjasama penelitian “Peningkatan Efektivitas Model Pranata dan Tata Kelola Pengelolaan Hutan Lestari: Studi Kasus di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta”, kami bersinergi memfasilitasi agar kebijakan nasional terkait KPH dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan pengelolaan hutan. Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM
Dr. Budiadi, S.Hut, M.Agr.Sc

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel dan Gambar	iv
Pendahuluan	1
Pengelolaan Hutan dalam Merespons Perubahan Zaman KPH sebagai Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat	2 4
Potensi Layanan Masyarakat oleh Balai KPH Yogyakarta	5
Penguatan Implementasi Perhutanan Sosial	6
Fasilitas Integrasi Kelompok Tani dalam Pasar	9
Penutupan	9
Daftar Pustaka	10

Daftar Tabel dan Gambar

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Metamorfosa paradigma pengelolaan hutan	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Petani perempuan Gunung Kidul	2
Gambar 2. Panen jati pertama oleh petani Hutan Kemasyarakatan (HKm)	4
Gambar 3. Inventarisasi potensi hutan (HKm Gunungkidul)	7
Gambar 4. Petani perempuan sekitar hutan	8

Pendahuluan

Konstitusi negara telah mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam (termasuk hutan) sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara perlu membentuk institusi birokrasi, menyusun dan menyiapkan instrumen kebijakan (Niskanen, 1973) untuk mewujudkan penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan hutan untuk kemaslahatan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan organ birokrasi negara yang diberi mandat untuk penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Selama ini, penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan hutan kental diwarnai kekakuan birokrasi, yang terjebak pada rutinitas dan formalitas ketimbang esensi pencapaian apa yang sudah diamanatkan. Banyak sorotan negatif karena belum memberikan kemaslahatannya bagi masyarakat luas.

Kebijakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan terobosan baru model institusional untuk pencapaian mandat-mandat pengelolaan hutan untuk kemakmuran rakyat, sebagai ujung tombak penyelenggaraan pengelolaan di tingkat tapak. KPH dibentuk sebagai lembaga untuk



Gambar 1. Petani perempuan Gunung Kidul
Foto: Koleksi penulis

menyediakan layanan publik, dengan mengimplementasikan garis-garis kebijakan kehutanan nasional dan sub-nasional, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan hingga tahap pengendalian. KPH harus mengidentifikasi dan memberdayakan potensi yang ada untuk kebermanfaatannya yang luas serta untuk mendukung tujuan-tujuan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. KPH juga dituntut untuk mampu memberi respons cepat terhadap kebutuhan lapangan dengan menyederhanakan proses yang terlalu birokratis.

Pengelolaan Hutan dalam Merespons Perubahan Zaman

Masyarakat dunia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0 dan era disrupsi, yang dicirikan kemajuan teknologi untuk peningkatan efisiensi aktivitas (Schwab, 2016). Kemajuan teknologi dan informasi yang menandai gelombang baru revolusi Industri seharusnya juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan pun berevolusi untuk mampu merespons perubahan zaman. Perjalanan sejarah mencatat beberapa metamorfosa konsep dan paradigma pengelolaan hutan (**Tabel 1**).



Oleh karena itu, diperlukan redefinisi dan redesain pembangunan kehutanan. Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang multidimensi dengan ragam kepentingan dan sifatnya yang lintas sektoral. Selama ini pembangunan kehutanan hanya diarahkan untuk mendukung untuk pertumbuhan dan pembangunan perekonomian. Pengelolaan hutan masa kini dituntut untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang lebih besar. Selain dituntut untuk berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan perekonomian, hutan dan kehutan dituntut

Masyarakat dunia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0 dan era disrupsi, yang dicirikan kemajuan teknologi untuk untuk peningkatan efisiensi aktivitas

berperan aktif dan berkontribusi positif dalam upaya, pengentasan kemiskinan dan kelaparan, mendorong keadilan sosial, dan penyediaan ruang dan sarana penghidupan yang baik dan sehat. Hal ini memerlukan berbagai inovasi kebijakan dan pendanaan, melalui berbagai mekanisme, termasuk pola kemitraan.

Tabel 1. Metamorfosa paradigma pengelolaan hutan

	s.d pertengahan 1980-an	Awal 1990-an	Pertengahan 1990-an	Kontemporer
Paradigma	Kelestarian hasil	Pengelolaan hutan lestari	Hutan untuk pembangunan berkelanjutan	Hutan sebagai bagian dari jejaring kebijakan lingkungan dan pembangunan
Slogan & motto	<i>"Logs to the Mill Gate"</i>	<i>"Forests are ecosystems"</i>	<i>"Wide range of benefits and environmental services"</i>	
Ideologi	Kejayaan industri perkayuan	Ragam manfaat dan jasa	Koordinasi antar sektor	
Fokus aksi & instrumen kebijakan	Regulasi pemerintah	Masyarakat madani	Instrumen pasar dan masyarakat madani	

Sumber: Maryudi (2018)

KPH sebagai Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat

Konseptualisasi kebijakan pembentukan KPH adalah untuk mendorongnya untuk mendayagunakan potensi dan kondisi spesifik wilayahnya untuk mencapai suatu sistem pengelolaan hutan yang mandiri. Kemandirian KPH saat ini lebih sering dimaknai sebagai kemandirian finansial, yakni untuk menghasilkan pendapatan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan hutannya (*self-financing management unit*), dan tidak lagi menjadi beban keuangan negara (Nugroho & Soedomo, 2016). Tidak mengherankan jika banyak KPH di Indonesia saat ini yang berlomba mengembangkan berbagai bisnis kehutanan berbasis barang dan jasa lingkungan.

Perkembangan zaman menuntut KPH sebagai model utama pembangunan hutan untuk mendefinisikan kembali apa yang perlu



Gambar 2. Panen jati pertama oleh petani Hutan Kemasyarakatan (HKM)
Foto: Muhammad Sidik /CIFOR

dibangun di tingkat tapak yang bukan sekedar tegakan semata. KPH perlu menciptakan ruang inovasi dengan tidak melulu berfokus pada pemanfaatan sumber daya hutan, namun juga menjadi institusi pelayanan publik sebagai representasi pemerintah (KLHK) di lapangan. Model seperti ini juga banyak diadopsi dalam pengelolaan hutan di negara lain, termasuk Jerman yang banyak dijadikan rujukan pengelolaan hutan berkelanjutan (**Box 1**).

KPH harus mampu menjadi penghubung birokrasi lintas sektoral terkait dengan sektor kehutanan agar mampu nilai manfaat dalam melayani masyarakat luas (termasuk masyarakat sekitar hutan).

Masyarakat seringkali kesulitan mendapatkan akses pasar dan peningkatan kapasitas dan pengetahuan mengenai apa yang sedang berkembang. KPH harus didorong untuk menjadi motor dan ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Potensi Layanan Masyarakat oleh Balai KPH Yogyakarta

Balai KPH Yogyakarta merupakan salah satu KPH yang telah memiliki sejarah yang cukup panjang untuk menuju jalan kemandirian. Balai KPH Yogyakarta mempunyai visi: "Terwujudnya kemandirian KPH menuju pengelolaan hutan lestari

Box 1 Contoh Model Layanan Masyarakat oleh Hessen Forst, Jerman (Hessian Ministry for Environment, Energy, Agriculture and Consumer Protection, 2012)

Jerman menganut sistem pemerintahan Federal, hutan berada dalam kewenangan negara bagian (*Landes*). Di negara bagian Hessen, ada beberapa sistem tenurial penguasaan hutan: hutan negara, hutan milik (*private*), dan hutan kelompok masyarakat. Kewenangan pengelolaan hutan negara di Hessen dimandatkan kepada Hessen Forst, yang merupakan badan usaha milik negara yang mempunyai beberapa KPH.

Pemerintah mewajibkan semua hutan (termasuk hutan milik) untuk dikelola secara berkelanjutan, yang dibuktikan dengan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Pemerintah menugaskan KPH-KPH untuk memberi layanan kepada pemilik hutan skala kecil (non-industri), yang terkendala dengan penyusunan rencana kelola hutan dan implementasinya, serta pembiayaan sertifikasi. Selain itu, KPH juga memfasilitasi mereka untuk dapat terintegrasi dengan pasar kayu dan industri pengolahan.

dan kemanfaatan bagi para pihak". Visi tersebut menyiratkan makna bahwa pengelolaan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta, selain ditujukan untuk keberlanjutan sumberdaya hutannya, juga untuk memproduksi berbagai layanan bagi masyarakat luas, tidak terkecuali masyarakat sekitar hutan yang banyak menggantungkan hidupnya pada hutan.

Penguatan Implementasi Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan salah satu prioritas kebijakan pemerintah (KLHK). Pemerintah menargetkan 12.7 juta hektar hutan negara untuk dibagikan kepada masyarakat, melalui berbagai skema

berbasis izin. Perhutanan Sosial diharapkan bisa menjadi bentuk tatanan dan pranata baru kehutanan Indonesia, dan digadang-gadang mampu menjadi wahana demokratisasi pengelolaan hutan. Perhutanan Sosial mempunyai potensi besar sebagai strategi pembangunan pedesaan yang inklusif, untuk mendorong percepatan penyejahteraan masyarakat desa yang masih miskin. Perhutanan Sosial yang sejati bertumpu pada peningkatan akses terhadap sumberdaya, agar masyarakat desa hutan berdikari dan bermartabat hidupnya.

Sampai dengan awal 2020, baru sekitar 4 juta hektar hutan negara yang telah didistribusikan (Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, 2020), masih jauh dari target awal.



Gambar 3. Inventarisasi potensi hutan (HKm Gunungkidul)
Foto: Puji Raharjo

Implementasi Perhutanan Sosial sering terkendala oleh prosedur birokrasi yang rumit maupun berbagai persyaratan teknis yang memberatkan masyarakat. Proses perizinan juga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, misalnya untuk penyiapan dokumen organisasi dan berbagai rencana kelola.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terdapat 42 Kelompok Tani Hutan yang telah mendapatkan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm), 6 desa yang telah mendapatkan izin Hutan Desa (HD), dan 3 Koperasi Unit Desa yang mendapatkan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Walaupun saat ini belum ada pengajuan izin baru, tidak berarti Perhutanan Sosial di DIY sudah purna. Yang justru krusial adalah bagaimana masyarakat pemegang izin mampu mendapatkan kemanfaatan dari sumber daya hutan.

Agar Perhutanan Sosial menjadi katalis penyejahteraan masyarakat desa hutan, pemerintah sering menekankan pentingnya usaha produktif. Penerima izin diharapkan dan tidak membiarkan lahan terbengkalai. Masyarakat desa hutan sering terkendala akses informasi, teknologi, pasar, dan pendanaan sehingga banyak potensi hutan terbuang percuma tidak termanfaatkan. Namun masyarakat mempunyai keterbatasan pengetahuan, teknologi, akses pasar, dan perbankan untuk memanfaatkan jasa lingkungan.

Dalam konteks usaha produktif, ada cerita sukses dari DIY, yakni Ekowisata Kalibiru. Keberhasilan mereka ditopang dukungan dan asistensi yang intensif dari pihak luar, baik pemerintah, LSM, dan perbankan. Kelompok-kelompok lainnya pun memerlukan dukungan serupa. Tidak semua



Gambar 4. Petani perempuan sekitar hutan
Foto: Muhammad Sidik/CIFOR

pemegang izin yang benar-benar mampu mendapatkan manfaat Perhutanan Sosial karena memiliki karakteristik, potensi dan tantangan yang berbeda. Layanan dan bantuan teknis yang sangat penting bagi kelompok masyarakat tidak banyak tersedia di lapangan. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan penarikan kewenangan urusan kehutanan dari pemerintah kabupaten (UU No. 23/ 2014). KPH dapat dan harus memainkan peran layanan kepada kelompok Perhutanan Sosial. KPH dapat membentuk satuan tugas khusus untuk penguatan Perhutanan Sosial.

Sebagaimana halnya dalam kasus kebijakan Perhutanan Sosial pemerintah, KPH dapat

memainkan peran penting untuk memberikan berbagai layanan teknis, dukungan organisasi (dan pendanaan, jika memungkinkan), untuk mendorong optimalisasi pengelolaan hutan rakyat agar petani mendapatkan insentif yang memadai. KPH dapat memberikan fasilitasi kelembagaan petani hutan rakyat, dan asistensi pelatihan, misalnya terkait konservasi tanah dan air, manajemen hutan lestari, administrasi keuangan, dan pelatihan teknik kehutanan. KPH dapat menjadi kepanjangan tangan birokrasi pemerintah dalam menjangkau petani hutan rakyat. Misalnya penghubung/ jembatan bagi penyaluran program-program KLHK untuk hutan rakyat seperti pembuatan

kebun bibit rakyat. KPH juga dapat berperan sebagai penghubung, dan representasi pemerintah terkait Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat.

Fasilitas Integrasi Kelompok Tani dalam Pasar

Pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil-hasil hutan, baik kayu dan non-kayu, merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam mendukung peningkatan penghidupan masyarakat desa. Ada banyak kajian ilmiah yang menunjukkan tren komersialisasi produk hasil hutan, belum memberikan kemanfaatan yang optimal. Petani masih menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan yang relatif paling sedikit di dalam rantai pasar (Perdana, 2018). Beberapa kendala mencakup: skala usaha, tingkat *entrepreneurship*, keterbatasan akses informasi pasar, dan kurangnya pemahaman terhadap struktur dan kanal pasar. KPH dapat membantu menyediakan informasi pasar, dan memfasilitasi terjalannya koneksi atau transaksi langsung dari kelompok tani ke industri, atau menyerap hasil-hasil petani hutan untuk dijadikan model bisnis baru (misal: pengolahan).

Penutup

KPH diharapkan menjadi ujung tombak penyelenggaraan pengelolaan hutan, untuk mengimplementasikan garis kebijakan kehutanan nasional di tingkat tapak. Model kelembagaan ini diharapkan mampu menjadi institusi yang mandiri dengan memanfaatkan dan memberdayakan dan memanfaatkan semua potensi yang ada. Namun inovasi dan kreasi ini diharapkan tidak berkompetisi langsung dengan inovasi masyarakat, yang saling memamatkan. Justru sebagai representasi pemerintah di lapangan, KPH juga perlu memperluas cakupan kegiatan sebagai model-model layanan bagi masyarakat secara langsung. Ada banyak potensi model layanan masyarakat yang bisa dikembangkan. KPH dapat memfasilitasi masyarakat desa hutan melalui berbagai skema pemberdayaan, pelatihan dan asistensi langsung, agar kemanfaatan KPH di lapangan bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. (2020). *Statistik Perhutanan Sosial: Capaian Perhutanan Sosial Tahun 2017 – 2020*. Dikases Maret 2020 dari <http://pkps.menlhk.go.id/3statistik>
- Hessian Ministry for Environment, Energy, Agriculture and Consumer Protection (2012). *Forests and Forestry in Hesse: Multipurpose Sustainable Forest Management-Commitment for Generations*. https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/forest_and_forestry_in_hesse_barrier-free_geschuetzt.pdf
- Maryudi, A. (2018). *Rejim Politik Kehutanan Internasional*. UGM PRESS.
- Niskanen, W.A. (1973). *Bureaucracy—servant or master?: Lessons from America*. Institute of Economic Affairs.
- Nugroho, B., & Soedomo, S. (2016). *Panduan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH*. <https://www.forclime.org/documents/Books/Kemandirian%20KPH.pdf>
- Perdana, A (2018). *Tata Niaga Kayu Rakyat. Hutan Rakyat di Simpang Jalan*, Maryudi, A., & Nawir, A. A (eds). UGM PRESS.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum. Switzerland.

KANOPPI (Kayu dan Non-kayu dalam Sistem Produksi dan Pemasaran yang Terintegrasi)

Kanoppi adalah kegiatan penelitian yang didanai ACIAR (*Australian Centre for International Agricultural Research*) dan dikoordinasikan oleh ICRAF (*World Agroforestry*) dan CIFOR (*Center for International Forestry Research*) sejak tahun 2013. Tujuan penelitian Kanoppi adalah mengidentifikasi, meningkatkan dan memperluas keterlibatan masyarakat kehutanan dalam mengelola produk kehutanan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui sistem produksi dan pemasaran yang terintegrasi pada tataran rumah tangga dan bentang alam.

Dengan pendekatan penelitian aksi partisipatif di Kanoppi, CIFOR dan Lembaga mitra (WWF Indonesia, Fakultas Kehutanan Universitas Mataram, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan) memfasilitasi proses pengembangan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung produksi dan strategi pemasaran kayu dan non-kayu terintegrasi.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gunungkidul dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dibuat atas Kerjasama:



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani